

**PERAN ORGANISASI BERBASIS IMAN (FBOs) DALAM WACANA
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs): STUDI KASUS
DOMPET DHUAFA YOGYAKARTA**



Oleh :

Ulfiyatun Nadzifah

NIM : 18200010165

TESIS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar Master of Arts (M.A)

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

YOGYAKARTA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ulfiyatun Nadzifah, S.Sos.**
NIM : 18200010165
Jenjang : Magister
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 29 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Ulfiyatun Nadzifah, S.Sos.

NIM. 18200010165

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ulfiyatun Nadzifah, S.Sos.**
NIM : 18200010165
Jenjang : Magister
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Ulfiyatun Nadzifah, S.Sos.

NIM. 18200010165

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**PERAN ORGANISASI BERBASIS IMAN (FBOs) DALAM WACANA
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs): STUDI KASUS
DOMPET DHUAFI YOGYAKARTA**

Yang ditulis oleh:

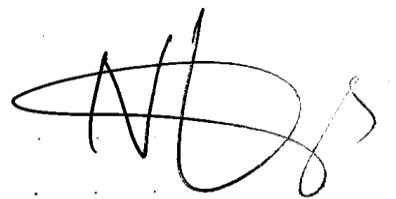
Nama : **Ulfiyatun Nadzifah, S.Sos**
NIM : 18200010165
Jenjang : Magister
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Master of Arts (M.A.)*.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 29 Juli 2021

Pembimbing



Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-409/Un.02//PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERAN ORGANISASI BERBASIS IMAN (FBOs) DALAM WACANA TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs): STUDI KASUS DOMPET DHUAFA
YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ULFIYATUN NADZIFAH, S.Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 18200010165
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Roma Ulinnuha, S.S..M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6119dab004a82



Penguji II

Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D.

SIGNED

Valid ID: 6119e344e45e9



Penguji III

Zulkipli Lessy, S.Ag., S.Pd., M.Ag., M.S.W.

SIGNED

Valid ID: 61160ad400bfd



Yogyakarta, 10 Agustus 2021

UIN Sunan Kalijaga

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 611dce47778be

ABSTRAK

Tesis ini meneliti peran Organisasi Berbasis Iman (*Faith Based-Organisations/FBOs*) dalam hubungannya dengan wacana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan studi kasus di Dompot Dhuafa Yogyakarta. Berangkat dari studi tentang agama dan pembangunan yang sebelumnya tidak saling bersinergi, penelitian ini mengulas tentang bagaimana eksistensi agama mempengaruhi wacana pembangunan terutama pada negara yang mayoritas masyarakatnya beragama. Penelitian ini berkontribusi pada studi filantropi Islam khususnya yang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Studi ini berargumen bahwa agama, yang dalam penelitian ini dicontohkan oleh FBOs, merupakan salah satu elemen kunci yang penting dalam membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Penelitian ini merupakan studi kualitatif terhadap upaya-upaya yang dilakukan Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam mendukung terwujudnya SDGs. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara langsung dengan pihak lembaga serta *mustahik* atau penerima manfaat program.

Kesimpulan tesis ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam mendukung SDGs dapat terlihat dari program-program lembaga yang mengusung konsep *sustainability* atau keberlanjutan. Program-program yang dilaksanakan antara lain mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dalam mendukung terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Dompot Dhuafa Yogyakarta telah berhasil mencapai 5 dari 17 poin target SDGs yang telah ditetapkan sebagai agenda pembangunan dunia. Target yang dicapai oleh Dompot Dhuafa antara lain poin 1, 3, 4, 6 dan 8, yaitu tanpa kemiskinan, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, pendidikan berkualitas, akses air bersih dan sanitasi, dan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Berangkat dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa agama dan pembangunan di negara yang mayoritas beragama, seperti Indonesia, tidak saling mendominasi dan telah bersinergi demi mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: FBOs, Filantropi Islam, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

MOTTO

“Work hard in silence, let success be your noise”

Frank Ocea



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya,
dan tentunya untuk diri saya sendiri.

“Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting. Thank you, I was actually pretty proud of myself!”



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan kesempatan yang diberikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, melalui wasilah sholawat nabi pula penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Penulisan tesis dengan judul “Peran Organisasi Berbasis Iman (FBOs) dalam Wacana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Studi Kasus Dompot Dhuafa Yogyakarta” tidak mungkin selesai tanpa adanya berbagai dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, mulai dari dosen-dosen, keluarga dan kolega. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam terselesaikannya tesis ini.

Pertama, kepada orang tua saya, Bapak Asjhadi S.Pd.I dan Ibu Siti Masrikah serta keluarga besar. Mereka adalah orang tua hebat yang tidak berhenti untuk memberikan doa, didikan, dan dukungan kepada saya. Semoga Allah memberikan nikmat sehat dan umur yang panjang agar saya bisa membahagiakan kalian.

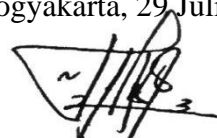
Kedua, penulis sangat berterima kasih kepada Bapak Najib Kailani, S.Fil.I, M.A., Ph.D selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini. Di tengah kesibukan beliau sebagai dosen dan peneliti, beliau berkenan meluangkan waktu untuk membimbing dan ikut berpikir keras demi terselesaikannya tesis ini.

Saya sampaikan terima kasih juga pada Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Kepada Ibu Dr. Nina Mariana Noor selaku Ketua Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*. Selanjutnya penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besanya kepada dosen-dosen yang membimbing dan menemani proses akademik penulis selama perkuliahan serta kepada seluruh staff administrasi yang telah membantu saya selama menempuh pendidikan di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

Kepada teman-teman Konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik yaitu Nihatuzzain, Imas, Dasilah, Dani, Budi, Jayyidan, Rohit, Ikhsan, Mahbub, dan Khalil. Terima kasih telah menjadi teman dalam berproses dan berjuang dalam perkuliahan ini. Kemudian, tak lupa kepada teman-teman terdekat saya, Mila, Farah, Fariza, dan Lia yang tak ada hentinya memberikan semangat dan dukungan juga yang selalu ada di setiap bahagia dan sedihku. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada para informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai demi terselesaikannya tesis ini.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati saya mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi akademik dan manfaat bagi para pembaca. Amin.

Yogyakarta, 29 Juli 2021



Ulfyatun Nadzifah, S.Sos
NIM. 18200010165

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	11
D. Kajian Pustaka	12
E. Kerangka Teori	21
F. Metode Penelitian	34
G. Sistematika Pembahasan	35
BAB II PERKEMBANGAN DAN WACANA GERAKAN FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA	38
A. Sejarah Kemunculan Filantropi Islam di Indonesia	38
B. Wacana Filantropi dan Pembangunan	53
C. Regulasi Zakat	54
D. Altruisme Islam Tradisional menuju Filantropi Modern melalui <i>New Media</i>	60
E. Zakat sebagai Instrumen SDGs	63
F. Filantropi sebagai Solusi Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial	67
Kesimpulan	70

BAB III PRAKTIK FILANTROPI DOMPET DHUAFa YOGYAKARTA	
A. Lembaga Amil Zakat Dompét Dhuafa	73
B. Proses Perekrutan Amil Dompét Dhuafa Yogyakarta	77
C. Manajemen Lembaga Dompét Dhuafa Yogyakarta	79
D. Implementasi Program Lembaga Dompét Dhuafa berbasis <i>Sustainability</i>	
1. Ekonomi	89
2. Pendidikan	102
3. Kesehatan	107
4. <i>Social Development</i>	115
Kesimpulan	116
BAB IV DOMPET DHUAFa DAN <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT</i>	
<i>GOALS</i> (SDGs)	119
A. Kontribusi Praktik Filantropi Dompét Dhuafa terhadap Ketercapaian SDGs	119
B. Hasil Program Dompét Dhuafa dalam Bidang Ekonomi	121
C. Hasil Program Dompét Dhuafa dalam Bidang Kesehatan	129
D. Hasil Program Dompét Dhuafa dalam Bidang Pendidikan	139
Kesimpulan	148
BAB V PENUTUP	150
A. Kesimpulan	150
B. Saran	153
DAFTAR PUSTAKA	155
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	161

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Pertumbuhan Pengumpulan ZIS 2002-2019	4
Gambar 1.2: Data Pengumpulan Nasional oleh OPZ se-Indonesia 2019	4
Gambar 2.1: Kanal Digital Pembayaran Zakat OPZ	62
Gambar 3.1: Program Kampung Ternak	92
Gambar 3.2: Beberapa Kegiatan Program Grant Making	101
Gambar 3.3: Workshop SLI	102
Gambar 3.4: Penandatanganan Mou Program <i>Inspiring Library</i>	104
Gambar 3.5: Para Mahasiswa Penerima Beasiswa Inspiratif	105
Gambar 3.6: Bagan Program LKC Dompot Dhuafa	108
Gambar 3.7: Lokasi Gerai Sehat	109
Gambar 3.8: Tim LKC Dompot Dhuafa Yogyakarta memberikan bantuan berupa jamban bagi masyarakat di Dusun Soka, Gunungkidul	113
Gambar 3.9: Peta Penyebaran Program LKC Dompot Dhuafa di Wilayah Yogyakarta	114
Gambar 3.10: Tim DMC Dompot Dhuafa Yogyakarta bersama warga dan relawan mencari sumber air bersih di Goa Macan Mati, Gunungkidul	116
Gambar 4.1: Beberapa produk hasil jahit oleh masyarakat yang mengikuti program Institut Mentas Unggul di	128
Gambar 4.2: Penyuluhan dengan Tema Cegah Hipertensi	134
Gambar 4.3: Tim LKC Dompot Dhuafa bekerjasama dengan Sahaja memberikan bantuan PTM untuk balita dan ibu hamil resiko tinggi	136
Gambar 4.4: Pemenuhan Akses Sanitasi Masyarakat melalui Program Air untuk Kehidupan oleh Dompot Dhuafa	138
Gambar 4.5: Pembuatan Media Belajar	143
Gambar 4.6: Relawan SLI bersama 40 Kepala Sekolah	143
Gambar 4.7: Siswa yang sedang membaca di Perpustakaan	145
Gambar 4.8: Kegiatan Literasi di Perpustakaan	146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tesis ini mengkaji peran Organisasi Berbasis Iman (*FaithBased-Organizations/FBOs*) dalam wacana pembangunan. Dalam kajian terdahulu, agama dianggap tidak memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Namun, seiring berkembangnya waktu, agama masuk ke dalam ide-ide pembangunan dunia, salah satunya dalam konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Melalui fenomena ini, penulis mengambil studi kasus di Dompot Dhuafa Yogyakarta sebagai salah satu bukti sinergitas agama dalam wacana pembangunan.

Konsep ‘pembangunan berkelanjutan’ atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah menjadi istilah umum dibicarakan dewasa ini dan telah menjadi fokus dunia internasional. Hampir seluruh negara menggunakan pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan utama dalam setiap pembangunannya. *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan tindak lanjut dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015, merupakan suatu rencana aksi global yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia, guna mengakhiri masalah kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Dalam SDGs setidaknya terdapat 17 Tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030.¹

¹ <https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu> diakses pada tanggal 4 Juli 2020

Faktanya, di tengah gencarnya program tersebut, masih banyak ditemukan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat. Angka kemiskinan yang tinggi, kesehatan dan lingkungan yang buruk, masalah pendidikan juga rendahnya taraf hidup masyarakat. Di Indonesia misalnya, masalah kemiskinan masih menjadi fenomena besar yang belum juga ditemukan solusinya. Isu kemiskinan tidak dapat lepas dari adanya ketimpangan ekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat. Perekonomian adalah faktor terpenting serta krusial bagi kehidupan yang menjadi penilaian kesejahteraan dan ketentraman hidup suatu negara dilihat dari grafik perekonomian masyarakatnya. Maka dari itu, menemukan solusi untuk ketimpangan ekonomi merupakan salah satu usaha pengentasan kemiskinan. Persentase angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen atau mencapai sekitar 26,42 juta jiwa, meningkat 1,63 juta orang atau 0,56 persen terhadap September 2019.² Sedangkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 di D.I. Yogyakarta sebanyak 475,72 ribu orang atau 12,28 persen terhadap total penduduknya. Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 34,8 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2019, yang mencapai 440,89 ribu orang.³ Jika fokus pada wilayah Pulau Jawa, DI Yogyakarta memiliki persentase penduduk miskin tertinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Jawa yaitu sebesar 12,1%.⁴

² Badan Pusat Statistik, “Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020”, No. 56/07/Th. XXIII, 15 Juli 2020

³ Badan Pusat Statistik, “Berita Resmi Statistik : Profil Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Maret 2020”, No. 43/07/34/Th. XXII, 15 Juli 2020

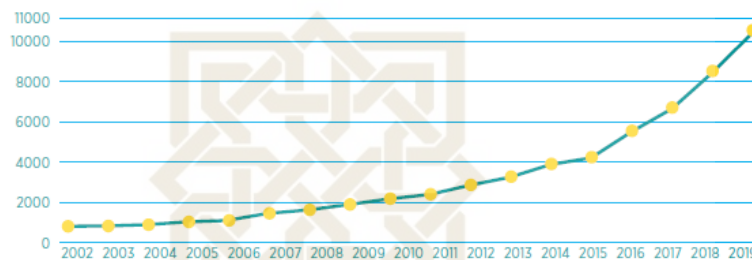
⁴ Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2021, 94.

Dalam UU pasal 34 ayat 1 UUD 1945 dikatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa negara adalah penanggung jawab dari kemiskinan dan kesejahteraan rakyat di Indonesia. Negara diartikan sebagai pemerintah yang bertugas sebagai aktor tunggal dalam kewajibannya menyelesaikan masalah masyarakat. Namun, jika dilihat lebih lanjut maka di era *governance* atau tata kelola pemerintataan saat ini pemerintah hanya sebagai salah satu aktor yang ada di dalam sebuah negara, artinya dalam mekanisme pembangunan juga melibatkan peran aktor non-negara. Pemerintah menjadi ketua pelaksana dalam usaha pengurangan kemiskinan masyarakat. Di samping itu, banyak lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan di masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan pengolahan sumber-sumber daya yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga yang fokus dalam pembangunan saling bahu-membahu dalam mengelola dan menggerakkan semua potensi agar berdaya dan berhasil secara maksimal. Salah satunya, fenomena tumbuhnya lembaga kedermawanan Islam cukup menarik untuk dikaji lebih mendalam dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan, lingkungan, budaya, dan lain sebagainya.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs tidak bisa lepas dari peran filantropi atau kedermawanan. SDGs dengan filantropi memiliki hubungan yang erat, hal tersebut bisa dilihat dari keselarasan program

filantropi dan target yang ingin dicapai dalam SDGs. Dalam mendukung tercapainya program SDGs di Indonesia, pemerintah berkontribusi dalam membuat peraturan khusus mengenai zakat, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Bahwa zakat merupakan salah satu pranata agama yang mempunyai tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 1.1⁵ Pertumbuhan Pengumpulan ZIS 2002-2019

Menelusuri data proyeksi zakat dari tahun 2002-2019, terlihat bahwa pengumpulan dana zakat selalu menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya.

No	Jenis Dana	2018	%	2019	%
1	Zakat Mal-Penghasilan	3.302.249.700.640	40,68	3.951.113.706.297	38,6
	Zakat Mal-Badan	492.422.843.634	-6,07	306.737.147.482	3
2	Zakat Fitrah	1.112.605.640.958	13,71	1.406.144.490.186	13,7
3	Infak/Sedekah Terikat	963.154.055.758	11,87	712.309.604.322	7
	Infak/Sedekah Tidak Terikat	1.439.878.355.805	17,74	2.582.142.106.259	25,2
4	CSR	114.347.788.466	1,41	96.395.440.616	0,9
5	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	692.939.298.007	8,54	1.173.101.311.393	11,5
Total		8.117.597.683.267	100	10.227.943.806.555	100

Gambar 1.2⁶ Data Pengumpulan Nasional Dana Zakat oleh OPZ se-Indonesia 2019

⁵Puskas BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2021, 52.

⁶*Ibid.*, 48.

Untuk data terakhir pada tahun 2019, dana zakat terkumpul sebesar 10,2 triliun meningkat sekitar 2,1 triliun yang berasal dari individu dan institusi atau perusahaan dan telah disalurkan kepada penerima manfaat dengan dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan dan sosial.⁷

Dalam pembahasan mengenai kedermawanan Islam, karitas dan filantropi merupakan istilah-istilah yang sering digunakan dengan maksud yang sama. Secara umum keduanya merujuk kepada tindakan untuk menolong kepada sesama atau juga bisa diartikan sebagai suatu tindakan untuk memberikan bantuan dengan tujuan menolong orang lain. Namun dibalik itu, dua istilah di atas sebenarnya memiliki definisi yang berbeda yang terletak pada bagaimana seorang menerimanya di masyarakat.

Karitas biasanya diartikan sebagai suatu tindakan membantu secara langsung untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi tanpa perlu adanya timbal balik, artinya seorang donatur tidak membutuhkan balasan dari kebaikan yang sudah ia lakukan, dan pada umumnya karitas ini ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*needy*). Di samping itu, filantropi adalah suatu tindakan untuk mengubah situasi seseorang melalui jalan adanya kerelawanan, pendampingan, dan pemberdayaan yang bersifat pembangunan. Hilman Latief mengutip pendapat Alien Shaw, menyatakan bahwa filantropi lebih dari sekedar karitas. Karitas lebih menekankan pada pelayanan (*service*) yang bersifat jangka pendek, sedangkan filantropi lebih menekankan pada

⁷*Ibid.*, 65.

pendampingan dan pemberdayaan yang bersifat jangka panjang untuk mewujudkan keadilan sosial.⁸ Secara sederhana untuk membedakan karitas dengan filantropi dapat diibaratkan dengan ikan dan pancing. Ketika seseorang diberi ikan, maka dia akan makan selama sehari, namun jika orang tersebut diberi pancing dan diajari cara memancing maka orang tersebut akan makan selama hidupnya.

Pembahasan mengenai praktik kedermawanan Islam setidaknya dapat dibagi menjadi dua tema besar, yaitu karitas Islam dan filantropi Islam. Praktik kedermawanan Islam di Indonesia mengalami proses transformasi dari karitas menjadi suatu lembaga derma yang berorientasi pasar atau biasa disebut dengan filantropi modern. Hal ini ditandai dengan adanya program yang berorientasi jangka panjang dengan isu pemberdayaan dan keadilan sosial. Dalam filantropi modern, bantuan jangka pendek seperti pemberian santunan kepada kaum dhuafa, anak terlantar, dan masyarakat miskin dianggap tidak menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Melihat fakta di lapangan bahwa masih banyak potensi sumber daya di Indonesia yang akan menjadi suatu hal yang diutamakan dalam mengeksplorasi program-program filantropis. Selain itu, isu-isu pembangunan berkelanjutan dalam bentuk gerakan filantropis menjadi banyak diminati kelompok-kelompok masyarakat akhir-akhir ini karena identik dengan penguatan modal sosial dan pemberdayaan masyarakat.

⁸ Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), 33.

Kehadiran lembaga-lembaga filantropi seakan menjawab keresahan program pemerintah yang sifatnya temporer. Pengakuan atas adanya potensi filantropi di Indonesia khususnya sebagai salah satu unsur penting bagi pembangunan berkelanjutan, yang tercantum pada Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di dalam peraturan tersebut, salah satu unsur yang dilibatkan dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah filantropi.

Pada tanggal 25 September 2015, negara-negara yang masuk dalam anggota PBB memutuskan rangkaian agenda pembangunan berkelanjutan 2030 yang didalamnya terdapat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang biasa disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs ini disusun bersumber pada agenda sebelumnya yaitu *Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah diupayakan sebelumnya pada tahun 2000-2015 dan akan mengarahkan pencapaian tujuan global yaitu pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030.⁹ SDGs disusun untuk melanjutkan pencapaian yang belum sempat tereleasisasi juga untuk menyempurnakan target-target yang lebih relevan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat.

Salah satu lembaga filantropi swadaya masyarakat yang bergerak dalam mendukung terwujudnya SDGs adalah Lembaga Filantropi Islam Dompot Dhuafa Yogyakarta. Dompot Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat

⁹“Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Yang Perlu Diketahui Oleh Pemerintah Daerah”, United Cities and Local Governments Asia – Pacific, hlm 3 dalam <https://www.uclg.org/sites/default/files/tujuan-sdgs.pdf>, Akses 04 Oktober 2020

kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf serta dana lain yang halal). Kehadiran Dompot Dhuafa pada tahun 1990-an merupakan pelopor tumbuhnya sejumlah lembaga filantropi Islam di Indonesia. Pembentukan lembaga ini merupakan berkah dari keberadaan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan ramahnya kebijakan rezim Orde Baru terhadap Islam pada saat itu.¹⁰ Hal tersebut bersamaan dengan pesatnya pertumbuhan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia yang dipengaruhi oleh klaim bahwa negara sudah tidak lagi mampu mendistribusikan kesejahteraan secara baik kepada masyarakat.¹¹ Pendampingan masyarakat, pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat miskin, kegiatan kemanusiaan, dan penanggulangan bencana saat itu menjadi isu-isu penting yang mulai diabaikan oleh negara dan justru ditangani oleh berbagai LSM baik nasional maupun internasional.¹² Minako Sakai menjelaskan bahwa munculnya sejumlah organisasi kemanusiaan berbasis agama (*faith-based organizations/FBOs*) pada dekade sekitar 1990-an dan era reformasi berhubungan dengan kegagalan negara dalam menangani masalah kemiskinan dan juga dikarenakan lemahnya dukungan masyarakat terhadap LSM yang tidak bekerjasama dengan agama tertentu (sekuler).¹³

¹⁰Amelia Fauzia, *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara* (Yogyakarta: Penerbit Gading, 2016), 204.

¹¹ Martin van Bruinessen, "Prawacana: Globalisasi Neoliberal dan Kedermawanan Islam" dalam Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), xi.

¹²Bruinessen, "Prawacana: Globalisasi Neoliberal," xi.

¹³Minako Sakai, "Building a partnership for social service delivery in Indonesia: State and Faith-Based Organization", *Australian Journal of Social Issues* 43, no. 3 (2012), 373-388.

Zakat mempunyai fungsi sebagai perekat solidaritas keagamaan dan solidaritas sosial, dan sangat berpotensi sebagai salah satu solusi untuk memecahkan problematika kesejahteraan masyarakat. Dompot Dhuafa terus berkomitmen untuk terus membenteng kebaikan dan mengajak seluruh elemen dalam kerja bersama mengentaskan permasalahan sosial bangsa. Salah satunya adalah dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁴ Penulis berusaha untuk menggali informasi tentang peran-peran Dompot Dhuafa Yogyakarta sebagai lembaga filantropi dalam upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui program-program unggulannya, khususnya di Yogyakarta.

Dompot Dhuafa bergerak dalam prinsip kedermawanan sosial atau filantropi. Sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan aktor di luar pemerintah yang mengedepankan kedermawanan sosial yang kemudian disebut dengan *philanthropy governance*.¹⁵ Kolaborasi ini merujuk bagaimana lembaga ini telah menjadi jembatan penghubung antar aktor. Sekitar 33 ribu warga di daerah Yogyakarta telah menjadi penerima manfaat program dari Dompot Dhuafa.¹⁶ Program-program yang dilaksanakan disesuaikan dengan sumber daya yang ada di daerah agar bisa bersinergi dalam mewujudkan tercapainya pembangunan berkelanjutan di Yogyakarta. Program-program pemberdayaan menjadi penting dilakukan oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta demi mendukung tercapainya tujuan pembangunan

¹⁴ <http://dompetdhuafa.org/about> diakses pada tanggal 20 Februari 2020

¹⁵ Yusuf Cahya M, *Philanthropy Governance Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Studi Kasus Peran Dompot Dhuafa Yogyakarta*, (Departemen Politik dan Pemerintahan: UGM, 2018).

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Bambang Edi Prasetyo, 25 Januari 2021

berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Maka dari itu, Dompot Dhuafa menjadi salah satu aktor penting dalam memberikan kepercayaan bagi para *muzakki* untuk menyalurkan dananya yang akan dikelola oleh lembaga, karena diperlukan pengelolaan secara baik dari segi penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pendampingan.

Tujuan pemberdayaan Dompot Dhuafa Yogyakarta adalah '*Mustahik Move To Muzakki*', yang berarti masyarakat yang awalnya sebagai penerima manfaat bantuan menjadi terlibat dalam gerakan bersama Dompot Dhuafa dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ibaratnya, masyarakat yang sebelumnya kurang mampu, setelah diberdayakan oleh Dompot Dhuafa menjadi golongan yang sudah bisa ikut berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat lainnya.

Dalam penelitian ini, penulis akan berupaya menyoroti lebih lanjut mengenai bagaimana praktik filantropi Islam Dompot Dhuafa sebagai salah satu FBOs melalui program-program yang telah dilaksanakan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Mengingat bahwa program-program yang gencar dilakukan oleh Dompot Dhuafa lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat, maka penulis juga hendak melihat bagaimana hasil dari adanya program-program yang telah dilakukan oleh lembaga terhadap upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat beberapa pertanyaan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan filantropi di Indonesia ?
2. Mengapa Dompot Dhuafa Yogyakarta melalui gerakan filantropi ingin mewujudkan ide-ide pembangunan dalam konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ?
3. Upaya apa yang dilakukan Dompot Dhuafa Yogyakarta untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana praktik filantropi Dompot Dhuafa Yogyakarta sebagai organisasi non-pemerintah dan aktor non-negara dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Alasan penulis mengambil judul tersebut adalah fakta yang terjadi di lapangan bahwa dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan tidak hanya mengandalkan peran dari pemerintah saja, namun juga peran organisasi non-pemerintah dan aktor non-negara. Kemudian, dengan adanya program-program lembaga yang fokus pada efek jangka panjang serta mengarah kepada pemberdayaan masyarakat, maka penulis juga ingin melihat bagaimana dampak adanya program-program filantropi Dompot Dhuafa terhadap terwujudnya SDGs.

Dalam ranah akademik, penelitian ini bertujuan agar bisa dipahami dan untuk menambah wawasan agar berguna untuk orang banyak mengenai bagaimana praktik filantropi Islam diterapkan dalam sebuah lembaga

filantropi sehingga bisa membantu program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Ada banyak ragam penelitian dengan tema filantropi Islam, khususnya mengenai filantropi yang menyangkut praktik dan manajemen pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf oleh lembaga filantropi dan orientasinya pada pemberdayaan masyarakat jangka panjang. Kecenderungan pertama adalah mengenai institusionalisasi lembaga filantropi. Beberapa literatur yang penulis baca dan dirasa relevan dengan penelitian ini, pertama adalah buku berjudul *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia* (2008) yang diterjemahkan menjadi *Filantropi Islam : Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (2016) karya Amelia Fauzia. Buku ini menjelaskan tentang sejarah filantropi di Indonesia dan kontestasi kegiatan filantropi yang berkaitan dengan hubungan dan peran negara dalam filantropi Islam. Menurut Fauzia terdapat tiga kontestasi diantara tiga kelompok besar umat Islam dalam kaitannya dengan posisi negara. Pertama, kalangan umat atau lembaga Islam yang mendukung kontrol negara terhadap agama dalam filantropi Islam. Kedua, kelompok yang menentang campur tangan dan institusionalisasi filantropi oleh negara. Dan ketiga, kelompok yang ingin memelihara filantropi tetap berada di tangan aktor-aktor non-negara, tetapi pada saat yang sama menuntut dukungan negara. Dinamika dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat muslim dan

negara bagaimanapun memunculkan nuansa baru dalam hubungan antara negara dan agama.¹⁷

Sejauh menyangkut filantropi Islam Indonesia yang terwujud melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf dalam kaitan dengan negara dan masyarakat madani (*civil society*), menurut Fauzia, “jika negara lemah, filantropi menguat”, sebaliknya “jika negara kuat, filantropi melemah”. Gagasan baru tentang modernisasi filantropi Islam mulai muncul di kalangan masyarakat muslim sendiri sejak 1950. Pada saat pemerintahan Soeharto, mendukung penuh aktivitas filantropi Islam, yang secara tidak langsung memajukan Islamisasi. Pemerintah Orde Baru mensponsori pembentukan Badan Amil Zakat. Namun, ketika pemerintahan BJ Habibie, banyak kalangan muslim meratapi ketika program filantropi ini dihentikan. Tata kelola pemerintahan pasca-Soeharto dianggap semakin lemah, namun sebaliknya, pertumbuhan masyarakat sipil dan filantropi Islam menjadi sangat fenomenal. Di saat yang sama, juga terjadi peningkatan kontestasi di antara figur-figur dan lembaga filantropi Islam. Berangkat dari masalah tersebut, tercipta suatu pertanyaan apakah negara perlu mengatur atau ikut campur dalam pengelolaan filantropi atau tidak.

Tulisan lain yang membahas mengenai filantropi adalah tulisan Hilman Latief yang berjudul *Melayani Umat : Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis* (2017).¹⁸ Tulisan tersebut menjelaskan

¹⁷ Amelia Fauzia, *Faith and The State : a History Of Islamic Philanthropy in Indonesia*, (Netherland: Brill, 2013).

¹⁸ Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*(Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2017), xxv.

mengenai kelembagaan dan praktik filantropi Islam dalam Muhammadiyah. Dalam analisisnya Latief menyebutkan bahwa ketika gerakan filantropi telah terstruktur dalam konteks kelembagaan yang mapan, program terencana, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, maka kelembagaan filantropi Islam tersebut tidak banyak ditafsirkan sebagai resistensi kepada Negara. Maraknya gerakan filantropi Islam secara institusional maupun komunitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin justru dapat disebut sebagai wujud resistensi terhadap negara mengenai ketidakmampuannya dalam menuntaskan masalah sosial kemasyarakatan. Dalam karyanya itu, Latief menyebutkan bahwa Muhammadiyah mampu mengubah praktik karitas menjadi filantropi khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan mendirikan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan panti asuhan.

Dalam tulisannya yang lain yang berkaitan dengan motif kedermawanan dapat juga dilihat dalam disertasi Hilman Latief, *Islamic Charities and Social Activism: Welfare, Dakwah, and Politics in Indonesia* (2012).¹⁹ Dalam penelitian tersebut Latief menjelaskan mengenai beragam motif sejumlah lembaga derma di Indonesia seperti Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, Lazis Muhammadiyah, dll, yang meliputi motif kesejahteraan (*welfare*), dakwah, dan motif politik. Penelitian tersebut menunjukkan bagaimana proses transformasi praktik kedermawanan Islam di Indonesia dari karitas ke filantropi.

¹⁹ Hilman Latief, *Islamic Charities and Social Activism: Welfare, Dakwah, and Politics in Indonesia* (Disertasi Utrecht University, 2012).

Adapun Konstantinos Retsikas dalam artikelnya yang berjudul “Reconceptualising Zakat in Indonesia: Worship, Philanthropy and Rights”²⁰ mengungkapkan adanya perubahan pemahaman zakat sebagai filantropi Islam yang sebelumnya dipahami sebagai ibadah tahunan yang dilaksanakan oleh muslim yang berorientasi pada bantuan jangka pendek menuju kepada bentuk pemberdayaan yang berorientasi jangka panjang dengan tujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Argumen yang diberikan oleh Retsikas menjelaskan bahwa sebenarnya zakat memiliki fungsi dimensi sosial dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Penataan dan pengelolaan kembali fungsi zakat dengan baik dan profesional merupakan hal yang penting dilakukan agar zakat berhasil menjadi sumber pranata sosial dan ekonomi umat. Beberapa LAZ yang diteliti oleh Retsikas yaitu Surabaya Peduli Umat, Pondok Infak Mulia, dan Dana Keadilan Indonesia yang telah menunjukkan perubahan yang signifikan dalam melaksanakan praktik zakat yaitu dengan menerapkan praktik filantropi yang mengarah kepada pemberdayaan dan bersifat jangka panjang.

Penelitian selanjutnya yaitu *Transformasi Dompot Dhuafa dari Lembaga Amil Zakat menjadi Lembaga Sosial-Kemanusiaan* (2013).²¹ Artikel yang ditulis oleh Ali Nurdin tersebut menjelaskan mengenai sejarah Dompot Dhuafa dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) menjadi Lembaga Sosial-kemanusiaan. Dompot Dhuafa berbeda dengan lembaga zakat yang lain

²⁰Konstantinos Retsikas, ‘‘Reconceptualising Zakat in Indonesia: Worship, Philanthropy and Right’’, *Indonesia and the Malay World*, Vol. 42, No. 124 (2014), 37-357.

²¹ Ali Nurdin, *Transformasi Dompot Dhuafa dari Lembaga Amil Zakat menjadi Lembaga Sosial-Kemanusiaan*, Jurnal Al-Turas Vol. XIX No. 2(Juli 2013).

karena memiliki program dalam hal sosial-kemanusiaan. Dalam pembahasannya, penulis tertuju pada periode sosial kemanusiaan Dompot Dhuafa pada tahun 2004-2012. Fenomena perkembangan lembaga filantropi Islam di Indonesia kini berkembang menjadi lebih baik, salah satunya yaitu Dompot Dhuafa yang terbilang cukup sukses dengan menggunakan manajemen modern. Transformasi program-program lembaga filantropi bukan hanya sebagai lembaga yang mengurus perhimpunan zakat saja namun juga sebagai lembaga yang menjalankan program sosial-kemanusiaan.

Melanjutkan pembahasan mengenai filantropi Islam, penulis mengambil referensi yang memfokuskan kajian di Yogyakarta, yaitu artikel yang berjudul *Potret Filantropi Islam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* (2013). Artikel yang ditulis oleh Nur Kholis (dkk) berisi penelitian tentang filantropi Islam di Provinsi DI Yogyakarta dengan mengacu pada manajemen internal, strategi *fundraising*, dan pengelolaan serta pendistribusian dana pada Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).²² Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari keseluruhan 28 organisasi filantropi di Yogyakarta, yang aktif dalam menjalankan aktifitas organisatoris filantropi dalam pengelolaan dan pendistribusian ZIS hanya 16 organisasi pengelola zakat (OPZ). OPZ yang aktif telah melaksanakan standar manajemen organisasi internal, strategi *fundraising*, pengelolaan dan pendistribusian dana, serta pola pengawasan dan transparansi, dengan derajat yang berbeda sesuai kapabilitas lembaga.

²²Nur Kholis, dkk, "Potret Filantropi Islam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam*, Universitas Islam Indonesia, Vol. 7 No. 1, (2013).

BAZ dan LAZ di lembaga pemerintahan mengandalkan pemotongan gaji dalam strategi *fundraisingnya*, sedangkan LAZ umum mengandalkan kreativitas program dan akuntabilitas lembaga. Distribusi dana diperuntukkan bagi fakir miskin, beasiswa pelajar, memberikan pelatihan, korban bencana alam, kegiatan-kegiatan produktif, dan pinjaman *qardhul hasan* atau modal bergulir yang berbentuk permanen. Sejauh ini Baru enam OPZ yang memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dari segi transparansi dan akuntabilitas berdimensi vertikal maupun horizontal, yakni secara moral kepada Allah SWT, *muzakki*, masyarakat luas dan dewan penasehat, dan juga memenuhi aspek akuntabilitas langsung kepada kebijakan pimpinan lembaga yang diwujudkan oleh beberapa OPZ dalam bentuk laporan bulanan, triwulanan, semesteran maupun tahunan. Beberapa OPZ yang lain hanya berbentuk laporan bulanan dan tahunan.

Kecenderungan kedua, selain mengenai konsep praktik filantropi, disini penulis juga menyertakan penelitian yang membahas mengenai praktik karitas berbasis kerelawanan yang dapat dilihat dalam penelitian Erica Bornstein yang berjudul *The Impuls of Philanthropy* (2009).²³ Dalam penelitiannya mengenai praktik karitas di India ia menyatakan bahwa keindahan di dalam praktik berderma terletak pada spontanitas yang muncul dari dorongan hati si pemberi. Hal tersebut menjadi sesuatu yang mengharukan ketika tidak ada regulasi atau aturan tentang kedermawanan. Tidak ada motif apapun atau tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan

²³Erica Bornstein, 'The Impulse of Philanthropy', *Cultural Anthropology*, Vol. 24, No. 4 (2009).pp. 622–651. ISSN 0886-7356, DOI: 10.1111/j.1548-1360.2009.01042

tersebut kecuali karena dorongan dari rasa belas kasih (*compassion*) itu sendiri. Dalam penelitiannya, Bornstein sebenarnya mengkritik praktik-praktik filantropi yang cenderung mengabaikan aspek bantuan jangka pendek karena adanya proses birokratisasi dan rasionalisasi dalam praktik kedermawanan. Menurut Bornstein, antara karitas dan filantropi sama-sama mempunyai peran penting dalam masyarakat sehingga dibutuhkan regulasi untuk mendukung keduanya.

Adapun Amira Mittermaier²⁴ dalam tulisannya *Beyond Compassion: Islamic Voluntarism in Egypt*, membahas tentang motif-motif kerelawanan di Resala, yaitu salah satu gerakan kedermawanan Islam di Mesir. Dalam karyanya, ia menyatakan bahwa unsur dari kerelawanan seperti meluangkan waktu, tenaga dan pikiran merupakan bagian dari sikap dermawan yang diyakini dapat menjadi pembuka pintu surga, ladang pahala, dan juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lainnya. Menurut Mittermaier, *volunteerism* atau kerelawanan dalam praktik kedermawanan tidak semuanya karena motif agama, namun juga ada yang dilatarbelakangi oleh motif sosial dan individual.

Kecenderungan ketiga, yaitu kajian yang membahas mengenai zakat dan pembangunan, pertama artikel yang ditulis oleh Imron Hadi Tamin yang berjudul “Filantropi dan Pembangunan.”²⁵ Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa pemanfaatan dana filantropi yang cukup besar di Indonesia belum bisa

²⁴ Amira Mittermaier, “Beyond Compassion: Islamic Volunteerism in Egypt”, *American Ethnologist, Jurnal of The American Ethnological Society*, Vol. 41, No. 3 (2014), 518-531.

²⁵ Imron Hadi Tamin, “Filantropi dan Pembangunan”, *Jurnal Community Development*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2016).

menjawab permasalahan utama mengenai masalah sosial yang dihadapi bangsa ini. Hal tersebut disebabkan karena adanya kendala mengenai tata kelola organisasi dan akuntabilitas sebuah organisasi. Selain itu, kendala komunikasi dan kerjasama antar *stakeholders* dapat menurunkan kinerja filantropi. Maka dari itu, perlu adanya pertimbangan lebih lanjut untuk menjadikan filantropi sebagai sektor ketiga (alternatif) dalam pembangunan dengan memberikan ruang kepada lembaga filantropi untuk membangun kelembagaan yang kuat untuk menambah kekuatannya dalam pembangunan. Dengan membangun kerjasama, saling berkorespondensi dan saling berkomunikasi antara berbagai *stakeholders* pembangunan akan memaksimalkan kinerja filantropi dalam keberhasilan proses pembangunan di negara ini.

Kemudian, artikel yang berjudul “Filantropi Islam: Praktik Dan Kontribusinya Terhadap Ketercapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)” yang ditulis oleh Nasrulloh.²⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga filantropi Islam, dalam hal ini adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yatim Mandiri yang memiliki kontribusi positif dalam pencapaian SDGs. Beberapa program telah dilakukan oleh lembaga ini seperti penggalangan dana ZISWAF untuk anak yatim dan dhuafa melalui pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan yang sejalan dengan tujuan utama SDGs.

²⁶ Nasrulloh, “Filantropi Islam: Praktik Dan Kontribusinya Terhadap Ketercapaian Sustainable Development Goals (SDGs)”, *Annual Conference for Muslim Scholars*, UIN Sunan Ampel Surabaya (23-24 November 2019).

Sejalan dengan artikel diatas, ada pula riset yang dilakukan oleh Farhan Amymie dkk yang berjudul “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)”.²⁷ Dalam artikel tersebut dikatakan bahwa zakat merupakan salah satu instrumen yang ampuh untuk memberikan solusi tentang pembangunan dan pemerataan ekonomi secara adil dan bijaksana. Tujuan yang ingin dicapai dalam riset tersebut adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan dana zakat di BAZNAS Jawa Barat, kemudian untuk mengetahui keterkaitan SDGs dengan tujuan zakat, yang terakhir adalah untuk mengetahui hasil dan rencana strategis optimalisasi pendistribusian dana zakat dalam pencapaian SDGs di BAZNAS Jawa Barat. Adapun hasil dari riset tersebut mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan zakat BAZNAS Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi yang yang bersangkutan dan pengumpulan dana zakat dilakukan melalui UPZ yang terdapat di provinsi tersebut, kemudian strategi penguatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Jawa Barat yaitu dengan adanya program SDGs dan zakat memiliki kesamaan tujuan untuk mengurangi kemiskinan, termasuk kelaparan yang terjadi di dunia ini dan beberapa permasalahan lainnya.

Studi berikutnya adalah mengenai peran lembaga filantropi Islam dalam pemberdayaan yang terdapat dalam penelitian Zulkipli Lessy dalam disertasinya yang berjudul *Philanthropic Zakat for Empowering Indonesia's*

²⁷ Farhan Amymie, dkk, “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)”, *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 2 No. 4 (2017).

*Poor: A Qualitative Study of Recipient Experiences at Rumah Zakat*²⁸.

Penelitian tersebut melihat peran Rumah Zakat sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional di Indonesia yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin. Aktivitas pemberdayaan oleh Rumah Zakat tersebut diarahkan dalam kegiatan ekonomi, sosial, kesehatan dan juga pendidikan, sehingga berdampak pada peningkatan kemandirian masyarakat penerima manfaat Rumah Zakat.

Mengarah kepada kajian-kajian di zakat atas, studi ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya dengan fokus gerakan filantropis Islam di Indonesia. Penelitian ini memiliki perbedaan dari studi-studi sebelumnya, kajian ini ingin melihat bagaimana praktik yang mengarah kepada praktik filantropi Lembaga Dompot Dhuafa Yogyakarta sebagai salah satu lembaga FBO di Indonesia yang dalam tujuannya menciptakan pembangunan berkelanjutan dan perannya sebagai aktor non-negara dalam kerjasamanya dengan negara untuk melayani masyarakat dengan program pemberdayaan yang bersifat jangka panjang.

E. Kerangka Teori

Untuk memahami mengapa *faith-based organizations* (FBOs) merupakan salah satu aktor kunci dalam proses pembangunan, penelitian ini terlebih dahulu akan mengeksplorasi diskursus mengenai agama dan pembangunan yang kemudian akan memunculkan sebuah korelasi di antara peran agama terhadap pembangunan berkelanjutan.

²⁸ Zulkipli Lessy, *Philanthropic Zakat for Empowering Indonesia's Poor: A Qualitative Study of Recipient Experiences at Rumah Zakat* (Indiana: Indiana University, 2013).

Wacana pembangunan sejatinya didasari oleh asumsi-asumsi yang berkaitan dengan kemajuan, ekonomi, masyarakat, pertumbuhan, ketergantungan dan globalisasi.²⁹ Agama dan negara merupakan dua variabel penting yang berhubungan dengan pembangunan suatu negara dan mengatur semua sisi kehidupan dalam masyarakat. Agama menjadi sebuah bingkai kepercayaan kepada Tuhan dalam membangun karakter dan kehidupan manusia, sedangkan negara merupakan tempat dimana manusia hidup di bumi. Agama hadir sebagai suatu unsur ekonomi politik yang sama kompleksnya karena unsur-unsur agama tersebar di seluruh ranah pembangunan.³⁰

John A. Rees mengungkapkan dengan menerapkan dinamika agama dalam studi pembangunan, terbentuk sebuah konsep agama yang sekuler (*secular religion*), terintegrasi dan sakral yang menonjol dalam pendekatan pembangunan ortodoks dan kritis.³¹ Ketiga konsep tersebut menunjukkan perbedaan kedudukan sebuah agama terhadap pembangunan. Dalam konsep agama sekuler (*secular religion*) terhadap pendekatan pembangunan baik pendekatan ortodoks maupun kritis, agama ditempatkan dibawah mekanisme dan kepentingan lain yang lebih dominan. Berbeda dengan agama sekuler, agama terintegrasi ditandai dengan adanya keseimbangan dinamika sekuler dan sakral, sehingga sulit untuk menentukan komponen mana yang lebih diutamakan. Sedangkan dalam agama sakral dimaknai dengan keunggulan

²⁹ John A. Rees, *Religion in International Politics and Development* (USA: Edwar Elgar Publishing, 2011), 50.

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

aktor dan kepentingan agama untuk membentuk agenda pembangunan dan menggugat prioritas pembangunan.

Philip Fountain, Robin Bush dan Michael Feener³² juga berbicara mengenai agama dan pembangunan, menurutnya bahwa agama dikenalkan sebagai elemen kunci ketiga setelah pembangunan dan politik yang diperlukan untuk memahami bagaimana hubungan ekonomi politik terutama di Asia sekarang ini. Hal tersebut mengarahkan pandangan kita lebih luas lagi untuk memahami peran berbagai institusi dan individu dalam pembangunan serta dinamika agama di dalamnya. Selain itu, untuk mencapai pembangunan tidak hanya membutuhkan sebuah aksi yang berorientasi secara politik saja namun juga perhatian yang terfokus pada peran agama. Kurangnya perhatian terhadap agama terkadang menyebabkan ketidakberhasilan sebuah pembangunan yang menjadi bukti kuat bahwa agama menjadi pemain penting dan berpengaruh secara politik baik di tingkat komunitas maupun nasional di negara berkembang.

Dalam lingkup studi pembangunan, agama muncul sebagai bidang yang menarik namun muncul lebih lambat daripada politik, sebagai contoh pada pergantian abad ke-21, para komentator kritis menarik perhatian pada bias lama di bidang pembangunan yang menghalangi agama dari diskusi kebijakan dan akademik. Begitu pula yang diungkapkan oleh Katherine Marshall dan Lucy Keough, bahwa *the world of religion* sering kali tidak diakui dan tidak terlihat di antara banyaknya praktisi pembangunan, baik

³² Philip Fountain, dkk, *Religion and the Politics of Development* (England: Palgrave Macmillan, 2015), 10.

secara tertulis maupun di lapangan³³, namun dewasa ini hal-hal mengenai tersubordinasinya agama dalam pembangunan ditantang oleh beberapa golongan. Beberapa sarjana mengatakan bahwa saat ini kita menyaksikan kebangkitan agama global atau lebih sederhananya, bahwa saat ini kita berada pada dunia pasca-sekuler, hal tersebut dilihat dari argumen-argumen bahwa tesis sekularisasi telah kehilangan banyak kekuatan dan eksistensinya³⁴ dan sebaliknya, saat ini telah mengalami peningkatan di kalangan akademisi tentang keterlibatan langsung dengan agama.

Penjelasan di atas sejalan dengan pandangan Haynes, ia meyakini kemungkinan adanya kebangkitan agama dalam wacana dan proses pembangunan. Agama mulai mendapatkan tempat dalam masyarakat diakibatkan karena kekecewaan dan kegagalan yang dijanjikan oleh pembangunan.³⁵ Terutama bagi masyarakat di negara berkembang yang mengalami keterlambatan pembangunan, agama menjadi aspek penting dari identitas penting. Masuknya agama dalam proses pembangunan, tidak mencoba memaksa aktor-aktor yang bekerja dalam lingkup keagamaan untuk menyetujui kerasionalan modern, dan juga sebaliknya, prinsip-prinsip modernisasi tidak perlu untuk menurunkan standarnya agar dapat menampung keterlibatan aktor atau institusi keagamaan dalam agenda pembangunan. Namun, ada kemungkinan dua aspek tersebut bisa bersinggungan secara lebih kooperatif dengan ide-ide keagamaan dan

³³ Katherine Marshall dan Lucy Keough, *Mind, Heart and Soul in the Fight Against Poverty* (Washington DC: The World Bank, 2004), 2.

³⁴ Jeffrey Haynes, *Religion and Development: Conflict or Cooperation?* (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 54.

³⁵ *Ibid.*

spiritualitas yang disisipkan untuk memberikan sebuah improvisasi dalam proses pembangunan, sehingga tidak hanya mencapai tujuan pembangunan ekonomi saja namun juga terhadap aspek pembangunan manusia sehingga memberikan pemahaman yang lebih inklusif terhadap makna pembangunan itu sendiri.³⁶ Sementara itu, potensi pelaku atau aktor keagamaan memberikan dampak besar terhadap hasil pembangunan, misalnya perkiraan \$200 miliar hingga \$1 triliun per tahun yang dana zakat dan sedekah terkumpul di negara Muslim, di mana angka tersebut melampaui jumlah yang diberikan oleh *Official Development Assistance* (ODA) atau Bantuan Pembangunan Pemerintah.³⁷

Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang juga menjadi tempat yang berhubungan dengan keterlibatan dan signifikansi antara sektor pembangunan, negara dan lembaga keagamaan.³⁸ Sebagai contoh di Indonesia, kebangkitan agama mulai dirasakan saat akhir era Orde Baru, dimana pada periode ini hubungan antara Islam dan pemerintah semakin membaik karena keduanya merasa saling membutuhkan. Pemerintahan Soeharto terkenal dengan kerjasamanya dengan organisasi berbasis muslim. Organisasi-organisasi keagamaan berada di garis terdepan dalam berbagai situasi pelayanan, berangkat dari hal tersebut maka sering menimbulkan hibridisasi dengan negara. Apakah program-program yang dilakukan merupakan contoh negara yang mengkooptasi agama, agama yang

³⁶ Haynes, *Religion and Development*, 60.

³⁷ Rees, *Religion in Politics*, 24.

³⁸ Philip Fountain, *Religion and the Politics*, 22.

menguasai negara, atau bentuk simbiosis yang saling menguntungkan dan melengkapi, hal-hal tersebut masih menjadi bahan perdebatan hingga saat ini.³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa integrasi antara agama ke dalam proses pembangunan diharapkan mampu memberikan alternatif jawaban terhadap masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. Salah satunya adalah masifnya organisasi filantropi yang muncul di Indonesia sekitar tahun 90-an. Gerakan tersebut muncul karena kegagalan pemerintah dalam mentransfer kesejahteraan kepada masyarakat, sehingga kekosongan posisi diisi oleh aktor non-negara yaitu organisasi-organisasi filantropi. Selain itu, dalam konteks Indonesia, persoalan mengenai pengelolaan dana filantropi mulai diatur dalam sebuah regulasi oleh negara, hal tersebut bisa dilihat dari bagaimana negara mengatur BAZ dan LAZ yang mengelola dana filantropi dengan beberapa indikator dan persyaratan. Hal tersebut bisa dilihat sebagai bentuk hubungan yang signifikan antara agama dalam pembangunan.

Secara umum filantropi didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik. Dalam lingkup dunia Islam, kata filantropi disamakan dengan istilah yang beragam, seperti zakat, *shadaqah* (sedekah), *birr* (kebaikan), *'amal al-shalihat* (perbuatan baik), *'ata' khayri* (pemberian untuk kebaikan), *al-'ata' al-ijtima'i* (pemberian sosial), *al-takaful al-insani* (solidaritas kemanusiaan), dan *ihsan* (nilai kebajikan).⁴⁰ Dalam dunia

³⁹ Jose Cassanova, *Public Religion in The Modern World* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1994).

⁴⁰ Fauzia, *Filantropi Islam*, 34; Barbara Ibrahim, *From Charity to Social Change, Trends in Arab Philanthropy* (Kairo: American University in Cairo Press, 2008), 11.

akademik, filantropi juga sering disamakan dengan istilah karitas (*charity*) yang memiliki arti cinta tak bersyarat (*unconditional love*). Namun, keduanya menuju kepada suatu aktivitas yang sama yaitu memberi.⁴¹

Dalam praktik kedermawanan, Cihan Tugal membagi menjadi dua macam yaitu karitas berorientasi pasar (*market-oriented charity*) dan karitas komunitarian (*communitarian charity*).⁴² Karitas berorientasi pasar yaitu praktik kedermawanan yang berusaha untuk lebih dari sekedar memberi bantuan kepada orang miskin atau biasa disebut dengan bantuan jangka pendek (*immediate help*) menjadi agen pasar yang terpercaya. Sedangkan karitas komunitarian merujuk kepada praktik kedermawanan yang berusaha mempertahankan diri sebagai gerakan sosial. Selain itu praktik ini juga membatasi diri dari mekanisme pasar.⁴³ Perbedaan dari kedua model praktik kedermawanan di atas dapat dianalisis dengan memahami bagaimana konsep yang digunakan dari kedua model kedermawanan tersebut tentang kemiskinan yaitu antara individu dan sosial, harapan lembaga terhadap orang miskin, tingkat birokratisasi seperti gaji yang kompetitif, pelatihan untuk pegawai/amil yang merupakan salah satu proses institusionalisasi, dan mayoritas program dan anggaran organisasi berorientasi pada pasar (jika dibandingkan dengan penyediaan, bantuan langsung dan amal kebaikan).⁴⁴

⁴¹Helmut K. Anheier and Regina A. List, *A Dictionary of Civil Society, Philanthropy and the Non-Profit Sector* (London-New York: Routledge, 2005), 196.

⁴²Cihan Tugal, "Contesting Benevolence: Market Orientations among Muslim Aid Providers in Egypt," *Qualitative Sociology* Vol. 36 No. 2 (2013), 141-159.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*

Gagasan mengenai keterkaitan antara filantropi & pembangunan tidak terlepas berdasarkan kontribusi yg berawal berdasarkan pandangan baru Robert Putnam & James O Midgley yang menelaah mengenai modal sosial (*social capital*) pada pembangunan. Baik Robert Putnam juga Midgley meletakkan faktor modal sosial menjadi pilar penyanggah pada konteks pembangunan. Midgley memetakan peranan 3 aktor krusial pada menciptakan kesejahteraan sosial yang wajib saling bersinergi yaitu pemerintah, swasta & masyarakat. Peran pemerintah pada pada pengentasan kemiskinan dicermati berdasarkan sudut pandang *state apparatus* yang dihubungkan menggunakan fungsi pemerintah menjadi lembaga negara yang memiliki tugas untuk mensejahterakan rakyatnya berupa kebijakan-kebijakan sosial.⁴⁵ Sedangkan peranan pihak swasta merujuk dalam pandangan menurut Adam Smith mengenai *invisible hand*. Banyaknya lapangan pekerjaan yang dibuka oleh sektor swasta akan berdampak dalam pengurangan jumlah pengangguran & kemiskinan. Di samping itu, program *corporate social responsibility* yang merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang diimplementasikan pada kegiatan sosial-humanisme & kerja-kerja sosial. Dan ketiga yaitu warga, warga ditinjau menjadi komponen mandiri yang memiliki modal sosial untuk mengentaskan dirinya & anggotanya dari jaring kemiskinan. Modal Sosial yang dimiliki warga antara lain merupakan filantropi (aksi kedermawanan).⁴⁶

⁴⁵James O Midgley, *Social Development; the Developmental Perspective In Social Welfare* (London: Sage Publication, 1995).

⁴⁶*Ibid.*

Di samping memetakan peranan dari ketiga aktor pilar pembangunan, Midgley juga memberikan tawaran teknis bagaimana filantropi sosial menjadi salah satu pendekatan di dalam mempromosikan kesejahteraan sosial melalui pemberian layanan kemanusiaan, berupa penyediaan layanan di bidang kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kegiatan ekonomi produktif. Penawaran Midgley melalui pemetaan ini bukan hanya bertujuan untuk memperjelas posisi keberadaan aktor siapa berperan sebagai apa dalam pembangunan masyarakat, akan tetapi bagaimana filantropi mempunyai kemampuan kreatif untuk mengembangkan kapasitasnya sebagai pilar pembangunan.⁴⁷

Menurut Robert L. Payton dalam *Understanding Philanthropy: It's Meaning And Mission* menjelaskan bahwa aktivitas filantropi mencakup tiga kegiatan, yakni pemberian sukarela (*voluntary giving*), pelayanan sukarela (*voluntary service*), dan organisasi sukarela (*voluntary organization*), yang dari kesemuanya ditujukan untuk kebajikan publik (*voluntary action for public good*). Hal tersebut berarti filantropi tidak hanya diartikan sebagai kegiatan yang bersifat individual, namun juga diartikan sebagai kegiatan kolektif yang dilaksanakan oleh organisasi maupun lembaga. Kegiatan tersebut mencakup pengumpulan dana, pengelolaan dana, dan pendayagunaan dana sosial yang berasal dari masyarakat yang ditujukan untuk masyarakat umum.⁴⁸

⁴⁷ James O Midgley, *Social Welfare in Global Context* (London : Sage Publication, 1997).

⁴⁸ Robert L Payton and Michael P. Moody, *Understanding Philanthropy: It's Meaning And Mission* (USA: Indiana University Press, 2008).

Membahas mengenai lembaga filantropi, Martin van Bruinessen dalam “Prawacana: Globalisasi Neoliberal dan Kedermawanan Islam” menjelaskan bahwa kemunculan lembaga-lembaga filantropi di seluruh dunia memiliki keterkaitan dengan semakin berkurangnya keterlibatan negara dalam mensejahterakan masyarakat di bawah kendali neoliberalisme.⁴⁹ Menurut Bruinessen, negara yang menganut sistem neoliberal akan meninggalkan tanggung jawabnya untuk mensejahterakan rakyatnya dengan kemudian diserahkan kepada sektor swasta. Dalam taraf tertentu negara akan menarik diri dari kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung dan menyerahkan masalah perekonomian dan kesejahteraan rakyat kepada mekanisme pasar.⁵⁰

Adapun Minako Sakai dalam “Building a partnership for special service delivery in Indonesia: State and Faith-Based Organizations”, mengatakan bahwa organisasi-organisasi yang berbasis agama (*FBO/Faith-Based Organization*) merupakan bagian dari aktor non-negara yang memiliki peranan penting dalam mengisi kekosongan negara dalam memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat lemah dan kurang beruntung. Program-program sosial yang dijalankan oleh FBO tersebut menjadi jaring pengaman penting di tingkat akar rumput negara.⁵¹

Merujuk pada beberapa pandangan dan pendapat ahli di atas, kemunculan Dompot Dhuafa sebagai lembaga filantropi di Indonesia dapat menjadi pengisi kekosongan negara dalam perannya untuk memberikan kesejahteraan

⁴⁹ Bruinessen, “Prawacana: Globalisasi Neoliberal,” xii.

⁵⁰ *Ibid.*, xi-xix.

⁵¹ Sakai, *Building a partnership*, 373.

kepada masyarakat. Di sisi lain, Dompot Dhuafa dapat diposisikan sebagai bagian dari aktor non-negara yang membantu pemerintah dalam mendistribusikan kesejahteraan dan membantu mewujudkan tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

Wacana pembangunan berkelanjutan bukanlah isu yang baru terdengar. Secara sederhana pembangunan berkelanjutan atau yang biasa disebut dengan *sustainable development* didefinisikan sebagai “*development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*” atau dengan kata lain proses pembangunan yang berprinsip ‘memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan’.

Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global yang dilaksanakan dalam 15 tahun kedepan dengan prinsip dasar yang mereka miliki, yaitu *People, Planet, Prosperity, Peace* dan *Partnership*.⁵² *People*, memastikan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensinya serta memastikan seluruh umat manusia dapat memenuhi potensi dan kemampuan mereka dengan bermartabat dan setara dalam lingkungan yang sehat. *Planet*, melindungi planet dari degradasi termasuk pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber-sumber daya alam yang berkelanjutan, dan mengambil tindakan cepat terhadap perubahan iklim agar planet dapat mendukung kehidupan saat ini dan yang akan datang. *Prosperity*, memastikan seluruh umat manusia dapat menikmati

⁵² Helly Khairuddin dan Erwin, “Analisa Keselarasan Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir (Baznas Inhil) Dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)”, *Jurnal Selodang Mayang*, Vol. 4 No. 2 (2 Agustus 2018).

kehidupan yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya, serta adanya kemajuan sosial, ekonomi dan teknologi yang berlangsung secara seimbang dengan alam. *Peace*, memelihara masyarakat yang damai, adil dan inklusif yang terbatas dari ketakutan dan kekerasan. *Partnership*, mengerahkan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan agenda 2030 melalui kerjasama tingkat global untuk pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan penguatan kerjasama yang berlandaskan semangat solidaritas global.

Konsep mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) itu sendiri lahir pada acara Konferensi mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Rio de Janeiro pada tahun 2012. Tujuan yang ingin dicapai dalam pertemuan tersebut adalah adanya tujuan bersama yang bersifat universal yang mampu memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. SDGs memiliki prinsip utama yaitu “Tidak Meninggalkan Satu Orangpun”, dalam artian setidaknya SDGs harus mampu mengatasi dua hal, *pertama* keadilan prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam proses pembangunan, dan *kedua* keadilan substansial, yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.⁵³ Untuk melaksanakan SDGs, Indonesia menerapkan prinsip inklusif dengan melibatkan empat platform partisipasi, yang terdiri dari Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar,

⁵³ Nasrulloh, *Filantropi Islam*, 368.

Filantropi dan Pelaku usaha, Organisasi masyarakat sipil dan media yang terfokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas. Setiap platform memiliki peran masing-masing, namun saling terkait satu sama lain.

Dalam misi program SDGs, terdapat 17 tujuan dan 169 target yang merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan berlaku sejak 2016 hingga 2030. Dari 17 tujuan tersebut ada beberapa poin yang dijadikan pokok permasalahan, seperti mengakhiri kemiskinan dan kelaparan sehingga mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan umum bagi semua, memastikan keberlangsungan ekonomi dan pendidikan yang inklusif serta berkualitas, serta menguatkan kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Secara lebih jelas, 17 tujuan dari SDGs tersebut antara lain⁵⁴ 1) Menghapus Kemiskinan; 2) Mengakhiri Kelaparan; 3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan; 4) Pendidikan Berkualitas; 5) Kesetaraan Gender; 6) Akses Air Bersih dan Sanitasi; 7) Energi Bersih dan Terjangkau; 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; 9) Infrastruktur, Industri dan Inovasi; 10) Mengurangi Ketimpangan; 11) Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan; 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; 13) Penanganan Perubahan Iklim; 14) Menjaga Ekosistem Laut; 15) Menjaga Ekosistem Darat; 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat; 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

⁵⁴ Ali Said, dkk, Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Di Indonesia, *Publikasi Badan Pusat Statistik*, Katalog BPS: 3102028, No. Publikasi : 07330.1701, <https://filantropi.or.id/pubs/uploads/files/3%20BPS%20Potret%20Awal%20TPB%20di%20Indonesia.pdf>

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang berbagai realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek kajian⁵⁵ dengan studi kasus di lembaga filantropi Islam Dompot Dhuafa Yogyakarta. Penulis memilih lembaga Dompot Dhuafa didasari alasan bahwa Dompot Dhuafa merupakan salah satu FBO yang besar Indonesia, selain itu Dompot Dhuafa juga merupakan *pioneer* berdirinya lembaga filantropi non-negara di Indonesia saat sebelum dikeluarkannya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang masih eksis sampai sekarang.

Subjek penelitian dalam tesis ini fokus pada internal lembaga seperti pimpinan cabang dan *supervisor* / staff pada masing-masing divisi serta *mustahik* atau masyarakat penerima manfaat. Penelitian ini disusun melalui metode triangulasi data. Sebagai validitas data maka tiga metode digunakan dalam penelitian, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Pertama, peneliti melakukan wawancara mendalam untuk mengetahui bagaimana praktik filantropi yang dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya di Yogyakarta. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan sepuluh narasumber, yaitu dengan pimpinan cabang Dompot Dhuafa Yogyakarta, Bapak Bambang Edi Prasetyo, serta *supervisor* program ekonomi, kesehatan

⁵⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), 68.

dan pendidikan yaitu Bapak Nuryanto, Mbak Nining, Mbak Zakia, Mbak Zizi, dan Mbak Erica yang bertempat di kantor Dompot Dhuafa. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan *mustahik* program Dompot Dhuafa Yogyakarta, yaitu dengan Ibu Nailul, Ibu Diah, Ibu Sunarsih, Bapak Syamsul Zuhri. Alasan peneliti memilih beberapa narasumber di atas adalah karena mereka memiliki kompetensi mengenai data yang ingin peneliti gali. Proses pengumpulan data dilakukan sekitar tiga bulan dari bulan Februari sampai Mei. Kedua, melakukan observasi dengan melihat aktivitas filantropi Islam melalui *website* dan aplikasi berbasis internet yang dimiliki oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta seperti jogja.dompetdhuafa.org. Ketiga, yaitu dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen terkait seperti laporan program dan gambar-gambar yang dapat merepresentasikan keabsahan penelitian. Pada kegiatan akhir, hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Setelah itu penulis deskripsikan hasil analisis tersebut secara lengkap dengan mereview dokumen secara lengkap. Selain itu, untuk kelengkapan analisis data, penulis mengumpulkan beberapa informasi dari berbagai literatur akademik yang berkaitan tentang agama dan pembangunan seperti filantropi Islam di Indonesia, wacana pembangunan berkelanjutan, dan lain sebagainya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan logis, penulis adakan menyusun pembahasan dalam tesis ini ke dalam beberapa bab. Diawali

dengan bab pertama yang berisi pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah dan kerangka metodologi yang penulis terapkan dalam pelaksanaan studi ini.

Selanjutnya, bab kedua membahas tentang sejarah dan perkembangan filantropi Islam di Indonesia. Bab ini secara umum berisi pembahasan mengenai transformasi kedermawanan Islam dari karitas menjadi filantropi modern, kemudian perkembangan kelembagaan filantropi Islam di Indonesia dalam wacana pembangunan berkelanjutan.

Bab ketiga memaparkan tentang praktik filantropi Dompot Dhuafa Yogyakarta. Dalam bab ini difokuskan untuk melihat bagaimana konsep filantropi diterapkan dalam lembaga filantropi. Konsep filantropi Islam diyakini memiliki peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat yang mampu menghilangkan kemiskinan dan persoalan ekonomi dengan program pembangunan berkelanjutan. Lembaga filantropi dengan kelembagaan yang mapan umumnya berbasis pasar, hal tersebut dicirikan dalam upaya mendistribusikan kesejahteraan disertai upaya birokratisasi (kelembagaan), program-program terstruktur yang bersifat pemberdayaan, bersifat jangka panjang dan berkelanjutan (*sustainable*). Dalam bab ini juga menyoroti manajemen lembaga Dompot Dhuafa. Sedangkan analisis lebih lanjut tentang bagaimana hasil dari program-program yang diinisiasi oleh Dompot Dhuafa akan disampaikan dalam bab empat.

Dalam bagian ini, penulis menjelaskan bagaimana hasil dari implementasi praktik filantropi Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam upaya

mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peneliti akan mengungkap hasil dari praktik filantropi terhadap kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Lembaga filantropi yang juga berperan sebagai aktor non negara dengan menggunakan model filantropi yang bersifat jangka panjang sejatinya memiliki tujuan untuk mentransfer kesejahteraan terhadap masyarakat. Terakhir, bab kelima berisi kesimpulan dari penelitian ini dan penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam ketiga bab sebelumnya, terdapat beberapa point penting yang dapat disimpulkan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam tesis ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, perkembangan gerakan filantropi Islam dalam konteks kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan. Gerakan filantropi Islam di Indonesia dipengaruhi oleh peran negara dan aktor non-negara. Hadirnya peran aktor non-negara, salah satunya adalah FBOs, disebabkan oleh klaim ketidakmampuan negara dalam mendistribusikan kesejahteraan pada masyarakat. Di samping itu, negara juga dianggap tidak mampu mengatasi berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, seperti masalah kemiskinan, adanya ketimpangan sosial, kesehatan yang buruk, pendidikan yang rendah, dan berbagai permasalahan lainnya. Berangkat dari persoalan tersebut, aktor non-negara muncul sebagai respon dari masyarakat sipil untuk mengangkat isu-isu kesejahteraan dengan mengisi ruang kosong negara yang saat itu tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.

Sejak kemunculan filantropi pertama kali sampai pada perkembangannya hingga di fase kontemporer, aktor non-negara memiliki semangat yang kuat dalam mengkampanyekan gerakan filantropi Islam terhadap isu-isu kesejahteraan. Kemudian, peran negara muncul ketika membawa wacana filantropi Islam dalam ruang publik sebagai potensi modal

dalam pembangunan. Ada beberapa faktor yang memiliki pengaruh yang penting dalam perkembangan filantropi hingga saat ini yaitu kondisi politik yang pro terhadap gerakan Islam, masyarakat sipil Muslim yang masif terhadap wacana Islamisasi, dan pengaruh adanya media baru yang semakin memperkuat gerakan filantropi dalam ranah gerakan sosial sebagai salah satu agenda kesejahteraan dan tercapainya pembangunan berkelanjutan saat ini.

Kedua, perkembangan filantropi Islam dari yang bersifat tradisional hingga bertransformasi menjadi filantropi untuk keadilan sosial. Dompot Dhuafa Yogyakarta telah menerapkan manajemen modern yang profesional dalam menjalankan lembaga. Selain itu, pendistribusian dana filantropi dialokasikan kepada program-program kreatif dalam upaya memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Sebagaimana ditandai dengan program-program yang bertujuan untuk pemberdayaan kaum dhuafa dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan juga sosial. Semua program yang dilaksanakan adalah sebagai upaya menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu cara mendukung tercapainya SDGs.

Ketiga, upaya yang telah dilakukan oleh Dompot Dhuafa Yogyakarta berhasil memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima manfaat. Program-program bersifat *sustainability* yang diusung oleh Dompot Dhuafa dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial menjadikan masyarakat mandiri dan mengalami peningkatan *skill* juga pengetahuan. Di samping itu, peningkatan pendapatan dan terbukanya kesempatan kerja juga

menjadi salah satu hasil positif dari adanya program-program tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari program Dompot Dhuafa Yogyakarta terbukti sejalan dengan tujuan SDGs yang telah menjadi agenda internasional saat ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan dari 17 Tujuan SDGs, Dompot Dhuafa Yogyakarta berhasil memenuhi 5 poin tujuan SDGs, meliputi Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan, Tujuan 3 Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia, Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas, Tujuan 6 Akses Air Bersih dan Sanitasi, dan Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga-lembaga filantropi Islam atau FBOs dapat memberikan sumbangsih terhadap pencapaian SDGs di negara ini khususnya di Yogyakarta.

Dari hasil penelitian tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa, peneliti melihat bahwa studi mengenai agama yang sebelumnya kurang mendapatkan tempat dalam wacana pembangunan sudah tidak eksis lagi bagi negara-negara yang masyarakatnya mayoritas beragama, salah satunya Indonesia yang masyarakatnya memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Hal tersebut bisa dilihat dari berkembangnya FBOs salah satunya yaitu lembaga-lembaga filantropi Islam yang dapat memberikan sumbangsih terhadap pencapaian SDGs di negara ini khususnya di Yogyakarta. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bagaimana sinergitas antara agama dan pembangunan. Dari aksi keagamaan-keagamaan seperti gerakan filantropi terbukti mampu membantu pemerintah dalam mewujudkan SDGs. Agama dan negara sama-

sama saling membutuhkan, artinya kedua aspek tersebut tidak saling mendominasi seperti yang telah diungkapkan oleh Rees serta Fountain. Agama menjadi elemen ketiga setelah pembangunan dan politik yang saling berkorelasi demi tercapainya proses pembangunan di suatu negara.

B. Saran

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian ini, penulis sadar bahwa penelitian ini belum menjadi akhir tentang kajian filantropi dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini juga masih perlu dikoreksi dengan kajian-kajian mendatang tentang filantropi. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan di segala sisi. Seperti halnya kajian yang penulis lakukan terkait peran FBOs dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan hanya terbatas pada satu lembaga filantropi yaitu Dompet Dhuafa Yogyakarta sebagai objek yang dianggap mewakili organisasi berbasis iman di Indonesia. Oleh karena itu, kedepan tulisan ini diharapkan mampu memberikan arah kepada penulis selanjutnya yang bergerak dalam filantropi Islam dan juga FBO lainnya untuk membahas dalam ruang yang lebih luas.

Topik penelitian ini memiliki banyak persinggungan dengan berbagai isu agama dan pembangunan. Oleh karena itu terdapat peluang yang masih sangat besar bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan topik ini. Terdapat beberapa isu yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini. Lembaga Amil Zakat sebagai instrumen penting dari lembaga filantropi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program

yang bersifat berkelanjutan, masih perlu dilihat perkembangannya dan perannya dalam mendukung tercapainya SDGs selain mencapai 5 target yang telah penulis kaji di atas. Ruang lingkup FBOs pun tidak hanya lembaga filantropi, namun masih banyak organisasi berbasis iman lain yang pastinya memiliki program yang sejalan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Artikel Jurnal

Abubakar, Irfan dan Bamualim, Chaider S., ed., *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial Studi tentang Potensi, Tradisi, dan pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*, Jakarta : CSRC UIN Jakarta, 2006.

Amymie, Farhan. “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)”, *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 2 No. 4, 2017.

Anheier, Helmut K. and Regina A. List. *A Dictionary of Civil Society, Philanthropy and the Non-Profit Sector*, London-New York: Routledge, 2005.

Anwar, Achmad Syaiful Hidayat. “Model Tata kelola Badan Dan Lembaga Amil Zakat Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Badan/Lembaga Amil Zakat Di Kota Malang)”, *Jurnal Humanity*, Vol. 7, No. 2, Juli 2012.

Badan Pusat Statistik (BPS). “Berita Resmi Statistik : Profil Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Maret 2020”, No. 43/07/34/Th. XXII, 15 Juli 2020.

Badan Pusat Statistik (BPS). “Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020”, No. 56/07/Th. XXIII, 15 Juli 2020.

Bahri, Efri S. *Zakat dan Pembangunan Sosial*, Kediri: FAM Publishing, 2013.

Bakar, Irfan Abu. *Filantropi Islam & keadilan sosial: studi tentang potensi, tradisi, dan pemanfaatan filantropi Islam di Indonesia*, Center for the Study of Religion and Culture: UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

BAZNAS. *Sebuah Kajian Zakat On SDGs; Peran Zakat Dalam Sustainable Development Goals Untuk Pencapaian Maqashid Syariah*, Jakarta Pusat: Pusat Kajian BAZNAS, 2017.

Bruinessen, Martin van. “Prawacana: Globalisasi Neoliberal dan Kedermawanan Islam” dalam Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017.

- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Cahya, Yusuf. *Philanthropy Governance Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Studi Kasus Peran Dompot Dhuafa Yogyakarta*, Departemen Politik dan Pemerintahan: UGM, 2018.
- Cassanova, Jose. *Public Religion in The Modern World*, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1994.
- Chusmeru, Sulaiman, A. I., dan Masrukin. "Strategy of Cooperative Islamic Boarding School as Economic Empowerment Community", *Jurnal Inferensi* Vol. 12, No.1, Juni 2018.
- Erica Bornstein. "The Impulse of Philanthropy", *Cultural Anthropology*, Vol. 24, No. 4, 2009.
- Fauzia, Amelia. *Faith and The State : a History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, Netherland: Brill, 2013.
- _____. *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara*, Yogyakarta: Penerbit Gading, 2016.
- Fountain, Philip, dkk. *Religion and the Politics of Development*, England: Palgrave Macmillan, 2015.
- Handoko, Hani. *Manajemen Personalia*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2008.
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Haynes, Jeffrey. *Religion and Development: Conflict or Cooperation?*, New York: Palgrave Macmillan, 2007.
- Herujito, Yayat M. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: PT. Grasindo, 2001.
- Ibrahim, Barbara. *From Charity to Social Change, Trends in Arab Philanthropy*, Kairo: American University in Cairo Press, 2008.
- Jahar, Asep Saepudin. "Masa Depan Filantropi Islam Indonesia, Kajian Lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf", *Makalah Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) Ke – 10*, Banjarmasin, 1 – 4 November 2010.

- Jusuf, Chusnan. "Filantropi Modern untuk Pembangunan Sosial", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol 12, No. 01, 2007.
- Juwaini, Ahmad. *Social Enterprise Transformasi Dompok Dhu'afa Menjadi World Class Organization*, Cet. 1, Jakarta: Expose / Mizan Group, 2011.
- Kailani, Najib. "Aspiring to Prosperity: The Economic Theology of Urban Muslim in Contemporary Indonesia", in *disertation in School of Humanities and Social Sciences*, Canberra: UNSW, 2015.
- Kasdi, Abdurrahman. "Optimalisasi Peran Dompok Dhu'afa Republika Dalam Pengembangan Ekonomi Umat", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 2 No. 2, Desember 2014.
- Kementerian PPN/Bappenas, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) Edisi II*, Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Khairuddin, Helly dan Erwin. "Analisa Keselarasan Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir (Baznas Inhil) Dengan Sustainable Development Goals (SDGs)", *Jurnal Selodang Mayang*, Vol. 4 No. 2, 2 Agustus 2018.
- Kholis, Nur, dkk. "Potret Filantropi Islam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam*, Universitas Islam Indonesia, Vol. 7 No. 1, 2013.
- Latief, Hilman. *Islam dan Urusan Kemanusiaan*, Zezen Zaenal Mutaqin (ed.), Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2015.
- _____. *Islamic Charities and Social Activism: Welfare, Dakwah, and Politics in Indonesia*, Disertasi Utrecht University, 2012.
- _____. *Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017.

- Lessy, Zulkipli. *Philanthropic Zakat for Empowering Indonesia's Poor: A Qualitative Study of Recipient Experiences at Rumah Zakat*, Indiana: Indiana University, 2013.
- Mahmudi. "Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat", *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 4 No. 1, 2009.
- Marshall, Katherine dan Lucy Keough. *Mind, Heart and Soul in the Fight Against Poverty*, Washington DC: The World Bank, 2004.
- Midgley, James O. *Social Development; the Developmental Perspective In Social Welfare*, London: Sage Publication, 1995.
- _____. *Social Welfare in Global Context*, London : Sage Publication, 1997.
- Mittermaier, Amira. "Beyond Compassion: Islamic Volunteerism in Egypt", *American Ethnologist*, *Jurnal of The American Ethnological Society*, Vol. 41, No. 3, 2014.
- Nasrulloh. "Filantropi Islam: Praktik Dan Kontribusinya Terhadap Ketercapaian Sustainable Development Goals (SDGs)", *Annual Conference for Muslim Scholars*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 23-24 November 2019.
- Noor, Zainulbahar dan Francine Pickup. *Laporan Singkat: Peran Zakat dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, BAZNAS, Mei 2017.
- Nurdin, Ali. "Transformasi Dompot Dhuafa dari Lembaga Amil Zakat menjadi Lembaga Sosial-Kemanusiaan," *Jurnal Al-Turas* Vol. XIX No. 2, Juli 2013.
- Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Payton, Robert L. dan Michael P. Moody. *Understanding Philanthropy: It's Meaning And Mission*, USA: Indiana University Press, 2008.
- PERPRES Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017, Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2021.

- Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2005.
- Rabbani, Hamzah dan Dadang Romansyah. “Analisis Dampak UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Eksistensi Dan Keberlangsungan Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat PKPU)”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vo. 2 No. 2, 2014, 117-146.
- Rakhmawati. “Hibriditas New Media Komunikasi dan Homogenisasi Budaya”, *Jurnal Komunikasi*, Vol. X No. 02, September 2016.
- Ramadhita. “Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat”, *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 3, Nomor 1, Juni 2012, 24-34.
- Rees, John A. *Religion in International Politics and Development*, USA: Edward Elgar Publishing, 2011.
- Retsikas, Konstantinos. “Reconceptualising Zakat in Indonesia: Worship, Philanthropy and Right”, *Indonesia and the Malay World*, Vol. 42, No. 124, 2014.
- Ricklief, M.C. *A History Of Modern Indonesia since 1.200*, edisi keempat, California: Stanford University Press, 2001.
- Said, Ali. Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) Di Indonesia, *Publikasi Badan Pusat Statistik*, Katalog BPS: 3102028, No. Publikasi : 07330.1701.
- Sakai, Minako. “Building a partnership for social service delivery in Indonesia: State and Faith-Based Organization”, *Australian Journal of Social Issues* 43, no. 3, 2012.
- _____. *Muslimah Kewirausahaan dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Dompot Dhuafa, 2018.
- Stoner, James A.F. *Manajemen* Jilid I, terj. Alexander Sindoro Edward Freeman (ed.), Jakarta: PT Prahallindo, 1996.
- Suhud, Abu dan Sri Harini. “Warung Beres Sebagai Modal Sosial Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Umat: Studi Pemberdayaan Komunitas oleh

Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul”, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, Vol. 1 No. 1, 2017.

Tamim, Imron Hadi. “Peran Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan di dalam Komunitas Lokal”, *The Sociology of Islam* Vol. 1 No. 1, 2011.

Tamin, Imron Hadi. “Filantropi dan Pembangunan”, *Jurnal Community Development*, Vol. 1 No. 1, Juni 2016.

Tugal,Cihan. “Contesting Benevolence: Market Orientations among Muslim Aid Providers in Egypt,” *Qualitative Sociology*, Vol. 36 No. 2, 2013.

Wahab, N. A., dan Rahim Abdul Rahman, A. “A Framework To Analyse The Efficiency And Governance Of Zakat Institutions”, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 2 No. 1, 2011.

Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen keuangan untuk Organisasi Pengelola zakat*, Bandung : Institut Manajemen Zakat, 2001.

B. Internet

<https://dmc.dompetchuafa.org/dmc-dompetchuafa-bantu-sediakan-air-bersih-di-dusun-macammati/> diakses pada tanggal 1 Juni 2021

<http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/sdgs/detail/6-akses-air-bersih-dan-sanitasi> diakses pada tanggal 5 Mei 2021

<https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu> diakses pada tanggal 4 Juli 2020

<http://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-3/> diakses pada tanggal 12 Juni 2021

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Yang Perlu Diketahui Oleh Pemerintah Daerah”, *United Cities and Local Governments Asia – Pacific*, hlm 3 dalam

<https://www.uclg.org/sites/default/files/tujuan-sdgs.pdf>, diakses pada 04 Oktober 2020

<http://dompetchuafa.org/about> diakses pada tanggal 20 Februari 2020